



686 DATA MASIH BERMASALAH
Pindah Kependudukan, Hak KMS Hilang

YOGYA (KR) - Petugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta mempercepat proses verifikasi calon pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk tahun 2014. Warga miskin dengan KTP Kota Yogyakarta namun domisilinya di luar kota, terancam tidak akan mendapatkan hak KMS.

Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Tri Maryatun mengungkapkan, pihaknya saat ini masih memaksimalkan data 686 keluarga yang masih bermasalah. "Data bermasalah ini rata-rata domisilinya tidak kami temukan sesuai dalam data. Kemungkinan sudah pindah sehingga kami komunikasikan dengan perangkat RT dan RW setempat," paparnya, Senin (23/9).

Jika kepindahan kependudukan tersebut masih seputar di wilayah Kota Yogyakarta atau hanya antar kecamatan, maka tinggal mengubah data. Akan tetapi, jika ternyata sudah berada di luar Kota Yogyakarta, maka data calon penerima akan dicoret. Hal ini lantaran pemberian hak KMS berdasarkan kependudukan.

Tri Maryatun menambahkan, pihaknya beberapa kali tidak bisa mengabulkan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) karena domisilinya di luar kota. "Dari segi administrasi atau KTP, dia warga kota. Tetapi setelah kami telusuri di lapangan, dia tinggalnya tidak di kota. Perangkat RT maupun RW juga membenarkan. SKTM tidak bisa kami terbitkan," imbuhnya.

Oleh karena itu, Dinsosnakertrans berharap, perangkat RT dan RW dapat mengetahui kondisi warganya secara faktual. Sehingga pencermatan terhadap data 686 keluarga yang bermasalah tersebut dapat segera dibetulkan. Pihaknya menargetkan, pada akhir bulan ini seluruh data sudah akurat.

Total data yang diverifikasi sebagai calon pemegang KMS 2014 mencapai 27.511 keluarga. Terdiri dari 6.212 keluarga yang diusulkan serta 21.299 keluarga pemegang KMS tahun ini. Dari seluruh data tersebut, yang telah berhasil diverifikasi mencapai 21.284 keluarga. "Sementara proses verifikasi, kami juga lakukan entry data sekaligus pengolahan. Harapannya, pada November sudah kami uji publik yang kedua sebelum ditetapkan pada akhir Desember nanti," ulasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Rifki Listianto berharap, pencermatan data 686 keluarga bermasalah tersebut dapat dilakukan secara optimal. Jangan sampai setelah data pemegang KMS ditetapkan, ternyata masih ada warga yang tercecer karena pendataan kurang cermat. "Warga miskin memang banyak yang pindah ikut keluarganya karena alasan ekonomi. Domisilinya harus diketahui betul agar haknya tidak hilang. Kecuali, yang bersangkutan sudah bukan warga kota lagi," jelasnya. (R-9)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat
tansi	Nilai Berita	Sifat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005